

Katalog : 4102002.1673

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KOTA PAGAR ALAM 2022



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PAGAR ALAM

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KOTA PAGAR ALAM 2022



**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022**

ISBN	: -
Nomor Publikasi	: 16730.2216
Katalog	: 4102002.1673
Ukuran Buku	: 18,20 cm x 25,70 cm
Jumlah Halaman	: xii + 62 halaman
Naskah	: Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Penyunting	: Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Gambar Kulit	: Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Diterbitkan Oleh	: BPS Kota Pagar Alam

<https://pagaralamkota.bps.go.id>

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab :

Aldianda Maisal

Penyunting :

Ummi Suciati

Penulis Naskah :

Wahyu Dwi Hayati

Gambar Kulit :

Wahyu Dwi Hayati

Vector dan Gambar :

Canva.com, Google.com, Freepik.com

KATA PENGANTAR

Dalam era pembangunan sekarang ini, data dan informasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mengambil sebuah kebijakan. Kegiatan perencanaan, pengendalian maupun evaluasi tidak akan berhasil tanpa menggunakan data. Sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS bertanggung jawab atas perstatistikan di Indonesia, termasuk perstatistikan di daerah.

Publikasi ini memuat informasi tentang perkembangan capaian dan posisi pembangunan manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Pagar Alam hingga tahun 2022. Metode penyajian data dilakukan dalam bentuk analisis deskriptif menggunakan pendekatan tabel, grafik, dan peta tematik untuk mempermudah pengguna data dalam memahami perkembangan capaian IPM beserta indikator penyusunnya. Sebagai bahan perbandingan, juga disajikan capaian IPM kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian publikasi ini penulis sampaikan terima kasih. Penulis berharap publikasi ini dapat bermanfaat bagi BPS Kota Pagar Alam secara umum dan bagi para pembaca secara khusus. Saran dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan kedepan. Terima kasih dan selamat membaca.

Pagar Alam, Desember 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Pagar Alam



Aldianda Maisal

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan dan Manfaat	4
1.3 Analisis dan Sumber Data.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II METODOLOGI.....	9
2.1 Konsep Pembangunan Manusia.....	9
2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	11
2.3 Penghitungan IPM	12
BAB III CAPAIAN KOMPONEN PEMBENTUK IPM	27
3.1 Capaian Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat	27
3.2 Capaian Dimensi Pengetahuan	30
3.3 Capaian Standar Hidup Layak	33
BAB IV PERKEMBANGAN IPM DAN PERBANDINGAN REGIONAL	37
4.1 Perkembangan IPM.....	37
4.2 Perbandingan IPM Kota Pagar Alam dengan Kabupaten/Kota Lain di Sumatera Selatan	38
BAB V PENUTUP	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	55

<https://pagaralamkota.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1. Komoditas Terpilih pada Metode Baru.....	21
Gambar 3.1. Capaian dan Pertumbuhan Harapan Hidup saat Lahir Kota Pagar Alam, 2010-2022.....	29
Gambar 3.2.1. Capaian Dimensi Pengetahuan Kota Pagar Alam (RLS), 2010-2022	31
Gambar 3.2.2. Capaian Dimensi Pengetahuan Kota Pagar Alam (HLS), 2010-2022	32
Gambar 3.3. Capaian Dimensi Standar Hidup Layak Kota Pagar Alam 2010-2022.....	34
Gambar 4.1. Capaian IPM Kota Pagar Alam, 2010-2022	38
Gambar 4.2. IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2022	39
Gambar 4.3. Indeks Kesehatan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2022	40
Gambar 4.4. IPM dan Indeks Kehatan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2022	42
Gambar 4.5. IPM dan Indeks Pengeluaran Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2022	43
Gambar 4.6. IPM dan Indeks Pengetahuan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2022	44
Gambar 4.7. Indeks Pengeluaran Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2022	45
Gambar 4.8. IPM dan Indeks Pengeluaran Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2022	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Perbandingan Penghitungan IPM Metode Lama dan Metode Baru.....	13
Tabel 2. 2. Nilai Maksimum dan Minimum Penghitungan IPM Metode Baru.....	16

<https://pagaralamkota.bps.go.id>

<https://pagaralamkota.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Capaian Angka Harapan Hidup Kota Pagar Alam, 2010-2022.....	56
Lampiran 2. Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pagar Alam, 2010-2022.....	57
Lampiran 3. Capaian Harapan Lama Sekolah Kota Pagar Alam, 2010-2022.....	58
Lampiran 4. Capaian Pengeluaran Per Kapita Riil yang Disesuaikan (PPP) Kota Pagar Alam, 2010-2022	59
Lampiran 5. Indeks Pembangunan Manusia Kota Pagar Alam, 2010-2022..	60
Lampiran 6. Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuk IPM Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2022.....	61
Lampiran 7. Indeks Komponen Pembentuk IPM Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2022	62

BABI

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Konsep pembangunan manusia kali pertama diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 melalui laporan yang berjudul Human Development Report (HDR). Konsep inilah yang diadopsi oleh Indonesia menjadi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

TUJUAN DAN MANFAAT

- Mengkaji perkembangan IPM Kota Pagar Alam dan Indikator penyusunannya sampai tahun 2022
- Mengkaji perbandingan IPM Kota Pagar Alam dan indeks penyusunnya dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Selatan

ANALISIS DAN SUMBER DATA

Analisis yang digunakan dalam publikasi ini bersifat deskriptif dengan komparatif data yang ada pada tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, sumber data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari BPS.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep pembangunan yang kurang komprehensif dengan hanya berfokus pada aspek ekonomi memunculkan pemikiran baru dalam melihat pembangunan. Seiring perkembangan waktu, makna pembangunan semakin berkembang serta cakupannya juga meluas. Pandangan ekonomi baru memaknai pembangunan sebagai proses perbaikan yang sifatnya multidimensional dan berkesinambungan dari suatu sistem tatana sosial atau masyarakat menuju kehidupan lebih baik. Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kekurangan tersebut dengan melihat pembangunan secara lebih komprehensif. Konsep pembangunan manusia kali pertama diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 melalui laporan yang berjudul *Human Development Report* (HDR). Dalam laporannya, UNDP menekankan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya.

Paradigma pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai titik sentral (*people centered development*), sehingga setiap upaya pembangunan mempunyai ciri dari - rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat bukan hanya sebagai alat untuk mencapai hasil akhir pembangunan, tetapi sebagai tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri. Maka dalam kerangka ini perlu diupayakan peningkatan kualitas penduduk sebagai sumber daya pembangunan, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), dan aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli, sehingga berdampak positif pada peningkatan partisipasi penduduk dalam pembangunan.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat seperti masalah ketahanan pangan, pendidikan, serta kesehatan tersebut dapat teratasi. Menurut Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ukuran standar pembangunan manusia di dunia dihitung dengan menggunakan *Human Development Index* (HDI), yang kemudian diadopsi di Indonesia menjadi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); pengetahuan (*knowledge*) dan standar kehidupan yang layak (*decent standard of living*).

Terkait dengan pembangunan manusia, dibutuhkan data yang representatif yang dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dapat dijadikan sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Oleh karena itu penerbitan publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2022 ini dipandang perlu sebagai salah satu sumber informasi penyusunan perencanaan yang terkait dengan pembangunan manusia di Kota Pagar Alam. Selain itu, Pemerintah Daerah dan masyarakat luas dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pembangunan yang telah dilakukan, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan daerah bagi pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Secara umum, penyusunan publikasi “Indeks Pembangunan Manusia Kota Pagar Alam 2023” memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

- Menyajikan data dan informasi mengenai posisi capaian pembangunan manusia khususnya IPM di Kota Pagar Alam beserta perkembangannya sampai tahun 2022
- Mengkaji perkembangan indikator penyusunan IPM di Kota Pagar Alam sampai tahun 2022
- Mengkaji perbandingan IPM Kota Pagar Alam dan indeks penyusunnya dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Selatan

Melalui publikasi ini diharapkan agar semua pihak yang berkepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya pembangunan manusia dapat mempertimbangkan hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap kualitas manusia, sehingga dapat mengambil kebijakan yang terbaik demi kelangsungan pembangunan Kota Pagar Alam dalam kerangka pembangunan nasional di masa-masa mendatang. Pada level nasional, data IPM antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota juga dijadikan sebagai salah satu alokator untuk menentukan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

1.3 Analisis dan Sumber Data

Analisis yang digunakan dalam publikasi ini bersifat deskriptif dengan komparatif data yang ada pada tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, sumber data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari BPS.

1.4 Sistematika Penulisan

Indeks Pembangunan Manusia Kota Pagar Alam Tahun 2022 disusun dalam lima bagian, yakni :

1. **Pendahuluan**, berisi latar belakang penulisan, maksud dan tujuan penulisan, cakupan pelaporan serta analisis dan sumber data.

2. **Metodologi**, berisi uraian tentang konsep pembangunan manusia, IPM, cara penghitungan IPM dan masing-masing komponen pembentuk IPM.
3. **Capaian Komponen Pembentuk IPM**, berisi uraian tentang perkembangan komponen-komponen pembentuk IPM.
4. **Perkembangan IPM dan Perbandingan Regional**, berisi uraian tentang perkembangan IPM selama periode 2010-2022 di Kota Pagar Alam serta perbandingan IPM dan Indeks pembentuknya se-Sumatera Selatan.
5. **Penutup**, bagian ini menguraikan tentang kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis IPM di Kota Pagar Alam

<https://pagaralamkota.go.id>

METODOLOGI

BAB II

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Secara konseptual Indeks Pembangunan (IPM) adalah indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), dan indeks standar hidup layak

CARA PENGHITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Penghitungan IPM yang dilakukan di Indonesia mengacu pada tiga dimensi berikut:



<https://pagaralamkota.bps.go.id>

BAB II METODOLOGI

2.1 Konsep Pembangunan Manusia

Sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja (Todaro dan Smith, 2003). Pengalaman pada dekade tersebut menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya. Munculnya fenomena tersebut menunjukkan bahwa pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu mendatangkan kesejahteraan masyarakat. Setidaknya terdapat dua alasan yang mendasari hal tersebut. Pertama, angka pendapatan nasional memang bermanfaat untuk banyak tujuan tetapi tidak mengungkapkan penerima hasilnya. Kedua, penilaian kinerja yang hanya mendasarkan pada indikator pendapatan nasional sering menimbulkan penafsiran yang keliru sebab ada aspek penting lain yang tidak tergambarkan oleh indikator tersebut, seperti akses terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, akses yang lebih besar ke pengetahuan, mata pencaharian yang lebih aman, kondisi pekerjaan yang lebih baik, keamanan dari tindak kejahatan dan kekerasan fisik, waktu senggang yang memuaskan, dan perasaan ikut serta dalam kegiatan ekonomi, budaya, dan politik.

Konsep pembangunan yang kurang komprehensif dengan hanya berfokus pada aspek ekonomi memunculkan pemikiran baru dalam melihat pembangunan. Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kekurangan tersebut dengan melihat pembangunan secara lebih komprehensif. Konsep pembangunan manusia kali pertama diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 melalui laporan yang berjudul *Human Development Report* (HDR). Dalam laporannya, UNDP menekankan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari

pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choices of people*). Pemberdayaan penduduk ini dapat dicapai melalui upaya yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu meningkatkan derajat kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya, dan politik.

Menurut UNDP (1995), ada empat pokok pilar pembangunan manusia, yaitu:

1. Produktivitas

Penduduk harus dimampukan untuk **meningkatkan produktivitas** dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah.

2. Pemerataan

Penduduk harus **memiliki kesempatan yang sama** untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial.

3. Kestinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi **juga generasi yang akan datang**.

4. Pemberdayaan

Penduduk harus **berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses** yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Dalam perspektif pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir, namun pertumbuhan ekonomi lah yang menjadi alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. Dengan demikian, pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi tetapi tidak anti terhadap pertumbuhan.

2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Secara konseptual IPM adalah indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak. IPM merupakan alat ukur kinerja pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah atau secara lebih spesifik merupakan alat ukur kinerja dari pemerintahan suatu wilayah negara, propinsi atau kabupaten/kota (UNDP, 1990; BPS, 1997).

Tinggi rendahnya nilai IPM dapat menjelaskan program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek.

Berikut beberapa manfaat penting penghitungan IPM:

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Peringkat tersebut bukan sekadar angka semata, namun benar-benar menggambarkan capaian suatu wilayah atau negara di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan sebagai rapor

kinerja Gubernur atau Walikota/Bupati yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

2.3 Penghitungan IPM

Sejalan dengan konsep pembangunan manusia yang dipromosikan oleh UNDP, Indonesia mulai melakukan penghitungan IPM pada tahun 1996. Saat itu IPM dihitung secara berkala setiap tiga tahun di tingkat nasional dan provinsi. Pada tahun 1999, Indonesia menghitung IPM sampai dengan tingkat kabupaten/kota dan dilakukan untuk periode data 1996 dan 1999, kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 2002 untuk data 2002. Sejak tahun 2004, IPM dihitung secara berkala setiap tahun sampai dengan level kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan, terutama dalam penentuan besaran Dana Alokasi Umum (DAU).

Sejak kali pertama merilis IPM pada tahun 1990, UNDP menggunakan tiga dimensi pembentuk IPM. Ketiga dimensi ini merupakan pendekatan yang dipilih dalam penggambaran kualitas hidup manusia dan tidak mengalami perubahan hingga saat ini. Dimensi tersebut adalah:

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
2. Pengetahuan (*knowledge*);
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Penghitungan IPM yang dilakukan di Indonesia mengacu pada ketiga dimensi tersebut. Ketika UNDP melakukan perubahan dan penyempurnaan metode penghitungan IPM, Indonesia juga turut mengadopsi metode tersebut dengan mengacu pada penyempurnaan yang dilakukan oleh UNDP. Penghitungan yang dilakukan sejak tahun 2015 hingga saat ini mengadopsi metodologi yang direvisi UNDP pada tahun 2014.

Secara ringkas, perbedaan metode penghitungan IPM yang digunakan di Indonesia dan UNDP beserta penyempurnaannya bisa dilihat di table berikut:

Tabel 2. 1. Perbandingan Penghitungan IPM Metode Lama dan Metode Baru

Dimensi	Metode Lama		Metode Baru	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (Rp)	PNB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (Rp)
Agregasi	Rata-rata Aritmatik		Rata-rata Geometrik	
	$IPM = \frac{1}{3}(I_{\text{kesehatan}} + I_{\text{pendidikan}} + I_{\text{pengeluaran}}) \times 100$		$IPM = \sqrt{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$	

Perubahan metodologi penghitungan IPM didasarkan pada alasan bahwa suatu indeks komposit harus mampu mengukur apa yang diukur. Dengan pemilihan metode dan variabel yang tepat, indeks yang dihasilkan akan relevan. Selain itu, terdapat dua hal mendasar yang menjadi alasan utama perubahan metodologi penghitungan IPM. Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat lagi digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan lagi menjadi indikator perkembangan pendidikan karena kurang menggambarkan kualitas pendidikan. Sebelum revisi penghitungan pada tahun 2010, AMH di sebagian besar negara sudah tinggi sehingga tidak mampu membedakan tingkat pendidikan antarnegara dengan baik. Dalam konsep pembentukan indeks komposit, indikator yang tidak sensitif dalam membedakan akan menyebabkan indeks komposit menjadi tidak relevan. Dengan pertimbangan tersebut, indikator AMH perlu diganti dengan indikator lain yang representatif. Penggunaan ratarata lama sekolah dan angka

harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran yang lebih relevan tentang dimensi pendidikan dan perubahannya.

Indikator berikutnya yang diganti adalah PDB per kapita. Indikator ini pada dasarnya merupakan pendekatan terhadap pendapatan masyarakat. Namun, konsep mendasar dalam penghitungan adalah PDB diciptakan dari seluruh faktor produksi yang menyertakan tenaga kerja dan investasi dari dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, PDB per kapita kurang dapat menggambarkan pendapatan masyarakat. Penggunaan PNB yang menggantikan PDB dapat lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah, karena hanya memperhitungkan faktor produksi yang menyertakan tenaga kerja dan investasi dari dalam negeri.

Kedua, penggunaan rata-rata aritmetik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah pada suatu dimensi tertutupi oleh capaian yang tinggi dari dimensi lain. Sementara itu, konsep mendasar dalam pembangunan manusia adalah pemerataan dimensi dan menghindari ketimpangan antardimensi. Penggunaan rata-rata aritmetik memungkinkan adanya transfer penilaian dalam capaian dari dimensi dengan capaian tinggi ke dimensi dengan capaian rendah, sehingga perlu diganti dengan rata-rata geometrik. Penggunaan rata-rata geometrik tidak serta merta dapat menutupi kekurangan pada suatu dimensi dengan dimensi lain yang unggul. Dengan kata lain, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang merata diperlukan keseimbangan antardimensi yang sama pentingnya.

Ada beberapa indikator yang digunakan oleh UNDP dan yang diimplementasikan dalam penghitungan IPM di Indonesia oleh BPS. Letak perbedaan tersebut adalah indikator pengetahuan dan indikator kehidupan yang layak. UNDP menggunakan angka melek huruf dan angka partisipasi kasar (*Gross Enrolment Ratio-GER*) sebagai indikator pengetahuan. Selain itu,

UNDP menggunakan angka PNB per kapita untuk mengetahui tingkat kehidupan. Akan tetapi, data tersebut tidak tersedia di tingkat daerah sehingga digunakan indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sebagai alternatif. Indikator ini dapat dihitung hingga tingkat kabupaten/kota. Indikator pengeluaran riil per kapita juga mampu mencerminkan indikator pendapatan masyarakat dan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai output dari kegiatan ekonomi. Data rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan dihitung berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi bulan Maret, indeks harga konsumen, dan data harga komoditas nonmakanan hasil survei harga konsumen yang layak sedangkan BPS menggunakan pendekatan indikator pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan.

Setelah penentuan dimensi dan indikator yang diadopsi dari UNDP, Langkah selanjutnya dari penghitungan IPM adalah menentukan nilai indeks indikator dari ketiga dimensi pembangunan manusia. Formula penghitungan indeks setiap indikator dilakukan menggunakan rumus umum indeks tunggal berikut.

$$\text{Indeks } X_{i,j} = \frac{(X_{i,j} - X_{i \min})}{(X_{i \max} - X_{i \min})}$$

Dimana:

$X_{i,j}$ = Komponen IPM ke-I dari daerah ke-j

$X_{i \min}$ = Nilai minimum dari komponen iPM ke-i

$X_{i \max}$ = Nilai maksimum dari komponen iPM ke-i

Batasan nilai minimum dan maksimum mengacu pada UNDP kecuali indikator daya beli. Nilai Maksimum dan Minimum Penghitungan IPM Metode Baru dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2. 2. Nilai Maksimum dan Minimum Penghitungan IPM Metode Baru

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	-	100 (PPP US\$)	1 007 436 (Rp)	107 721 (PPP US\$)	26 572 352 (Rp)

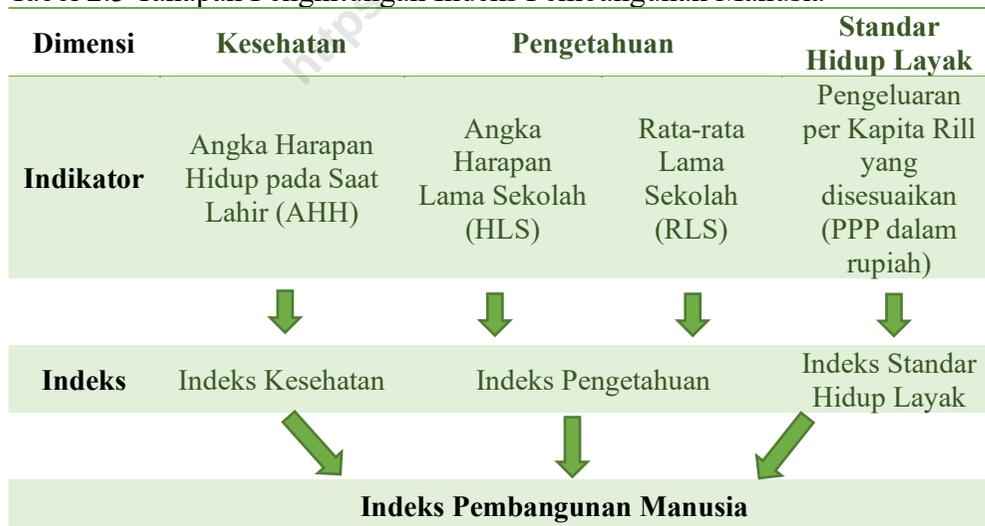
Keterangan:

*Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

**Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Tahap yang selanjutnya adalah menghitung nilai indeks setiap dimensi dan kemudian menghitung nilai IPM berdasarkan nilai indeks ketiga dimensi menggunakan metode rata-rata ukur (geometrik). Tahapan penghitungan IPM secara ringkas terangkum dalam table 2.3

Tabel 2.3 Tahapan Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia



Dimensi Kesehatan

Dimensi kesehatan direpresentasikan oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Penggunaan umur harapan hidup sebagai indikator didasari oleh kepercayaan umum bahwa umur panjang merupakan hal yang berharga dan kenyataan bahwa terdapat berbagai faktor yang berkaitan erat dengan umur harapan hidup, seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik.

UHH biasa dilambangkan dengan e_0 . Angka ini menyatakan perkiraan rata-rata usia atau tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada waktu tertentu (kohor yang sama) hingga akhir masa hidupnya, dengan asumsi pola mortalitasnya bersifat tetap. Penghitungan UHH dilakukan melalui pendekatan tidak langsung (indirect estimation). Standardisasi nilai UHH dilakukan dengan konversi menjadi indeks harapan hidup yang dihitung berdasarkan nilai maksimum dan minimum UHH yang sesuai dengan standar UNDP.

Berdasarkan angka harapan hidup yang dihasilkan, besarnya nilai indeks kesehatan dari wilayah yang bersangkutan juga dapat dihitung dengan formula:

$$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{(UHH - UHH_{min})}{(UHH_{maks} - UHH_{min})}$$

Dimana:

UHH = Umur Harapan Hidup

UHH_{min} = Nilai minimum dari, UNDP menetapkan 20 tahun

UHH_{maks} = Nilai maksimum dari, UNDP menetapkan sebesar 85

Nilai indeks kesehatan berada diantara angka nol (0) dan satu (1). Semakin mendekati nol menunjukkan keadaan yang semakin memburuk dan semakin mendekati satu menunjukkan keadaan yang semakin membaik. Untuk

mempermudah penafsiran, nilai indeks tersebut dapat dinyatakan dalam satuan ratusan atau dikalikan 100. Nilai indeks tidak memiliki makna khusus ketiga berdiri sendiri, tetapi ketika dibandingkan dengan angka yang sama dari daerah lainnya maka dapat dilihat gambaran pencapaian pembangunan di bidang kesehatan antar wilayah.

Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator tersebut merefleksikan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan formal. HLS menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal, sedangkan RLS menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem Pendidikan di berbagai jenjang. Sumber data yang digunakan untuk menghitung indikator HLS adalah hasil Susenas bulan Maret. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren.

HLS dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Dimana:

HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur di tahun t

E_i^t = Jumlah penduduk usia I yang bersekolah pada tahun t

P_i^t = Jumlah penduduk usia I pada tahun t

i = Usia (a, a+1, ..., n)

FK = Faktor koreksi pesantren

Adapun faktor koreksi pesantren dapat dihitung dengan formula:

$$\text{Faktor koreksi} = \frac{\text{Jumlah santri sekolah dan mukim}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 tahun ke atas}} + 1$$

Dengan

$\text{Jumlah santri sekolah dan mukim} = \text{rasio santri mukim} \times \text{jumlah santri sekolah}$

$$\text{Rasio santri mukim} = \frac{\text{Jumlah santri bermukim}}{\text{Jumlah santri seluruhnya}}$$

Sementara rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses Pendidikan sudah berakhir. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Sumber data yang digunakan untuk menghitung indikator RLS adalah hasil Susenas bulan Maret serta data jumlah siswa yang menjalani pendidikan dengan bermukim dari Kementerian Agama dan hasil inventarisasi data sektoral di daerah. Adapun formula penghitungan RLS sebagai berikut:

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

Dimana:

RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

x_i = Lama sekolah penduduk ke-I yang berusia 25 tahun

n = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Penghitungan indeks pengetahuan didasarkan pada rata-rata indeks HLS dan indeks RLS dengan bobot yang sama dimana dalam penghitungan indeks HLS dan RLS digunakan batasan nilai maksimum dan minimum yang sama dengan standar UNDP. Berikut formula penghitungan Indeks pengetahuan:

$$\text{Indeks Pengetahuan} = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2}$$

I_{RLS} = Indeks Rata-rata Lama Sekolah

I_{HLS} = Indeks Harapan Lama Sekolah

Rumus untuk penghitungan indeks rata-rata lama sekolah dan indeks harapan lama sekolah masing-masing dinyatakan sebagai berikut:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} \quad I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Dimana:

HLS_{min} = Nilai minimum dari HLS, sebesar 0 tahun

HLS_{maks} = Nilai maksimum dari HLS, sebesar 18 tahun

RLS_{min} = Nilai minimum dari RLS, yaitu sebesar 0 tahun

RLS_{maks} = Nilai maksimum dari RLS, yaitu sebesar 15 tahun

Dimensi Standar Hidup Layak

Standar hidup layak menggambarkan kualitas kehidupan atau tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak dari semakin membaiknya kondisi ekonomi maupun tingkat pemerataannya. BPS menggunakan pendekatan rata-rata pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan dengan daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun

dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan (dapat dilihat pada tabel 2.4). Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao. Jumlah komoditas ini bertambah cukup signifikan dibandingkan dengan metode sebelumnya (27 komoditas). Adapun rumus penghitungan Paritas Daya Beli (PPP, yaitu:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

Dimana:

PPP_j = Paritas Daya Beli (PPP) kabupaten/kota j

p_{ij} = harga komoditas i di kab/kota j

p_{ik} = harga komoditas i di Jakarta Selatan

m = jumlah komoditas

Gambar 2 1. Komoditas Terpilih pada Metode Baru

Makanan	Beras	Pepaya	+	Nonmakanan
	Tepung terigu	Minyak kelapa		
	Ketela pohon/singkong	Minyak goreng lainnya		
	Kentang	Kelapa		
	Tongkol/tuna/cakalang	Gula pasir		
	Kembung	Teh		
	Bandeng	Kopi		
	Mujair	Garam		
	Mas	Kecap		
	Lele	Penyedap masakan/vetsin		
	Ikan segar lainnya	Mie instan		
	Daging sapi	Roti manis/roti lainnya		
	Daging ayam ras	Kue kering		
	Daging ayam kampung	Kue basah		
	Telur ayam ras	Makanan gorengan		
	Susu kental manis	Gado-gado/ketoprak		
	Susu bubuk	Nasi campur/rames		
	Susu bubuk bayi	Nasi goreng		
	Bayam	Nasi putih		
	Kangkung	Lontong/ketupat sayur		
	Kacang panjang	Soto/gule/sop/hawon/tincang		
	Bawang merah	Sate/tongseng		
	Bawang putih	Mie bakso/mie rebus/mie goreng		
	Cabe merah	Makanan ringan anak		
	Cabe rawit	Ikan (goreng/bakar dll)		
	Tahu	Ayam/daging (goreng dll)		
	Tempe	Makanan jadi lainnya		
	Jeruk	Air kemasan galon		
	Mangga	Minuman jadi lainnya		
	Selak	Es lainnya		
	Pisang ambon	Rokok kretek filter		
	Pisang raja	Rokok kretek tanpa filter		
	Pisang lainnya	Rokok putih		
	Rumah sendiri/bebas sewa			
	Rumah kontrak			
	Rumah sewa			
	Rumah dinas			
	Listrik			
	Air PAM			
	LPG			
	Minyak tanah			
	Lainnya(batu baterai, aki, korek, obat nyamuk dll)			
	Perlengkapan mandi			
	Barang kecantikan			
	Perawatan kulit, muka, kuku, rambut			
	Sabun cuci			
	Biaya RS Pemerintah			
	Biaya RS Swasta			
	Puskesmas/pustu			
	Praktek dokter/poliklinik			
	SPP			
	Bensin			
	Transportasi/pengangkutan umum			
	Pos dan Telekomunikasi			
	Pakaian jadi laki-laki dewasa			
	Pakaian jadi perempuan dewasa			
	Pakaian jadi anak-anak			
	Alas kaki			
	Minyak Pelumas			
	Meubelair			
	Peralatan Rumah Tangga			
	Perlengkapan perabot rumah tangga			
	Alat-alat Dapur/Makan			

Berdasarkan nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan, indeks standar hidup layak dapat dihitung menggunakan formula berikut:

$$\text{Indeks pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pendapatan}) - \ln(\text{pendapatan}_{\min})}{\ln(\text{pendapatan}_{\max}) - \ln(\text{pendapatan}_{\min})}$$

Dimana:

pendapatan_{\min} = garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris), yaitu sebesar Rp. 1 007 436

pendapatan_{\max} = Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025, yaitu Rp.26 572 352

Penghitungan IPM

Seperti yang disampaikan sebelumnya, IPM menjadi indeks komposit atau gabungan yang merepresentasikan tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar yaitu dimensi kesehatan, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Berdasarkan nilai indeks yang mewakili ketiga dimensi tersebut maka nilai IPM pada level provinsi/kabupaten/kota dapat dihitung menggunakan formula rata-rata geometrik sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pengetahuan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

Nilai IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin besar nilai tersebut berarti kualitas pembangunan manusianya semakin baik. Untuk melihat capaian IPM antar wilayah, capaian nilai IPM ini kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori dengan tujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Berikut klasifikasi kategori capaian IPM:

- IPM kelompok “rendah” dengan kriteria nilai IPM <60
- IPM kelompok “sedang” dengan kriteria $60 \leq \text{IPM} < 70$
- IPM kelompok “tinggi” dengan kriteria $70 \leq \text{IPM} < 80$
- IPM kelompok “sangat tinggi” dengan kriteria nilai IPM ≥ 80

Kecepatan perubahan IPM juga menjadi salah satu fokus dalam pembangunan manusia. Pada metode lama, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan reduksi *shortfall*. Pada metode baru, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan pertumbuhan aritmatik. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya. Pertumbuhan IPM dapat dihitung dengan formula berikut:

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Dimana:

IPM_t = IPM suatu wilayah pada tahun t

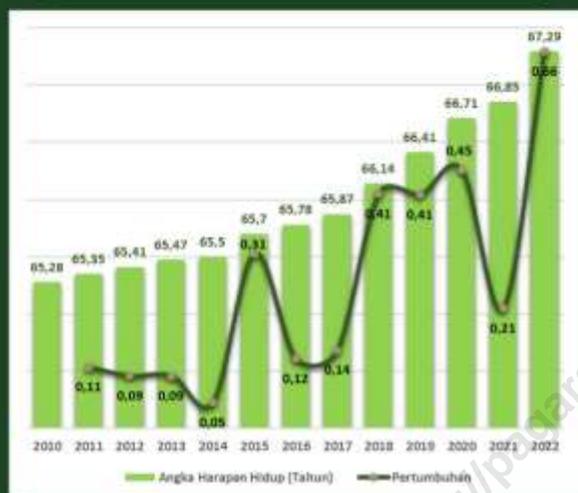
IPM_{t-1} = IPM suatu wilayah pada tahun t-1

<https://pagaralamkota.bps.go.id>

BAB III

CAPAIAN KOMPENEN PEMBENTUK IPM

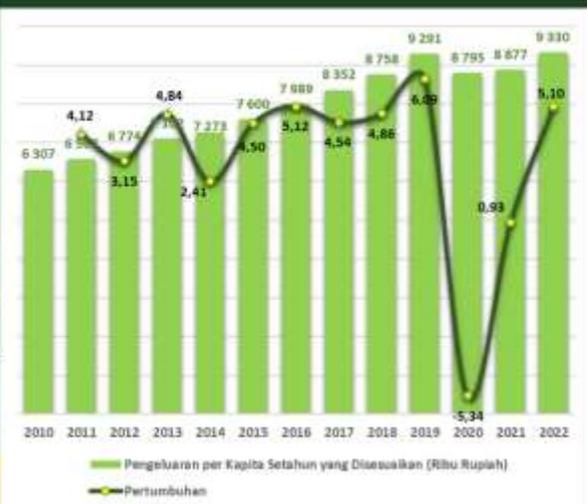
UMUR HARAPAN HIDUP



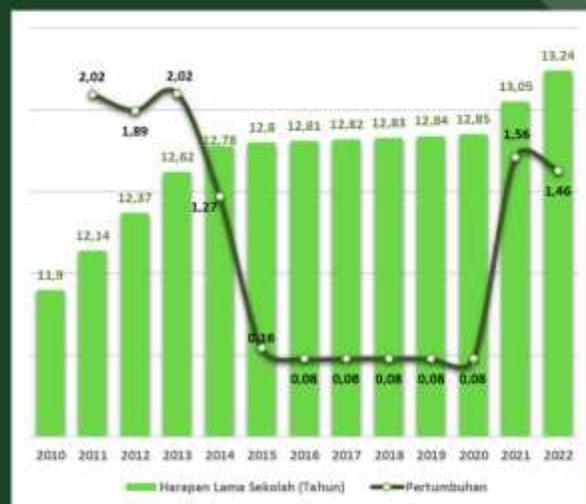
RATA-RATA LAMA SEKOLAH



PENGELUARAN (PPP)



HARAPAN LAMA SEKOLAH



BAB III CAPAIAN KOMPONEN PEMBENTUK IPM

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang karena pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Pada Bab ini akan dibahas mengenai pencapaian dan kecepatan tiap-tiap komponen pembentuk IPM di Kota Pagar Alam selama periode 2010-2022.

3.1 Capaian Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan harapan hidup saat lahir. Harapan hidup saat lahir menunjukkan derajat kesehatan suatu negara. Semakin tinggi harapan hidup saat lahir suatu negara, semakin tinggi pula derajat kesehatan suatu negara (Jen et al, 2010).

Capaian dimensi umur panjang dan hidup sehat Kota Pagar Alam periode 2010-2022 dapat dilihat pada gambar 3.1. Berdasarkan gambar tersebut, capaian dimensi umur panjang dan hidup sehat selama periode 2010-2022 mengalami kenaikan yang konsisten setiap tahunnya yaitu dari 65,28 tahun menjadi 67,29 tahun atau sebesar 2,01 tahun, artinya bayi yang baru lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup rata-rata hingga umur 67,29 tahun atau 2,01 tahun lebih lama dibandingkan anak yang lahir pada tahun 2010. Kenaikan umur harapan hidup ini mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat semakin membaik sehingga secara tidak langsung menunjukkan bahwa kualitas kesehatan penduduk Kota Pagar Alam pada tahun 2022 semakin membaik dari tahun ke tahunnya.

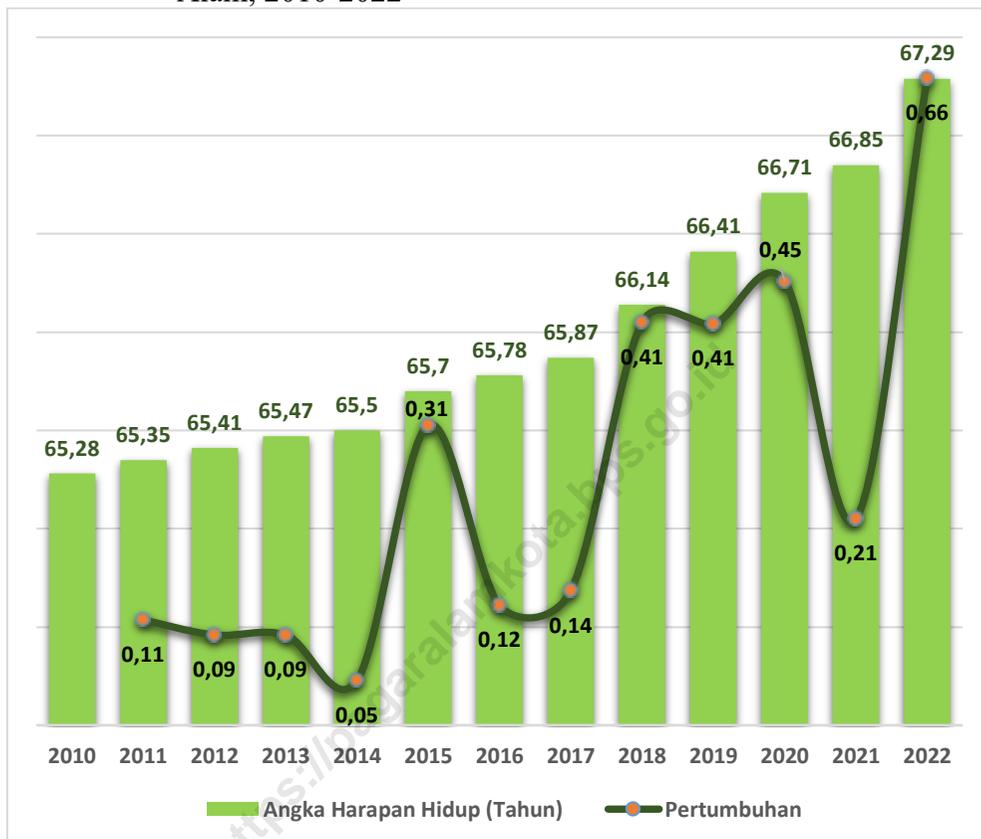
Apabila dilihat pertumbuhannya, dimensi umur panjang dan hidup sehat memiliki laju pertumbuhan yang cukup fluktuatif yaitu berkisar 0,05

persen sampai 0,66 persen dengan puncak percepatan terjadi pada tahun 2022 (0,66 persen). Pertumbuhan yang selalu bernilai positif ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup secara riil masih terus mengalami kenaikan meski pelan.

Fenomena peningkatan kualitas kesehatan penduduk ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam menjamin dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar melalui penyediaan infrastruktur dan sarana kesehatan dimana infrastruktur dan sarana yang dibangun harus diiringi dengan kualitas pelayanan yang baik oleh sumber daya tenaga kesehatan yang berkualitas. Di samping penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan, upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dan layanan persalinan secara adil dan merata bagi semua penduduk yang tinggal di wilayah Kota Pagar Alam juga akan mendorong peningkatan usia harapan hidup penduduk.

Di sisi lain, ada aspek lainnya yang harus terpenuhi yaitu kemampuan masyarakat dalam membayar jasa layanan kesehatan yang diaksesnya. Perbedaan pendapatan pada rumah tangga, khususnya pada golongan berpendapatan rendah mengalami kesulitan dalam pembiayaan layanan kesehatan. Subsidi pemerintah melalui sistem jaminan sosial berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) ataupun berbagai variasi kebijakan yang serupa. Dalam implementasinya, rumah tangga yang dicakup oleh Program KIS masih sangat terbatas sehingga masih sangat diperlukan upaya-upaya yang berkesinambungan untuk menjamin dan memperluas aspek pemerataan dalam menjangkau atau mengakses fasilitas kesehatan dasar bagi semua golongan penduduk

Gambar 3.1. Capaian dan Pertumbuhan Harapan Hidup saat Lahir Kota Pagar Alam, 2010-2022



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 3.1. juga menunjukkan capaian sebelum (2010-2019) dan selama (2020-2022) pandemi. Capaian harapan hidup saat lahir sebelum pandemi terus mengalami kenaikan meski dengan pertumbuhan yang fluktuatif. Kendati demikian, pertumbuhan harapan hidup saat lahir masih bertumbuh walaupun melambat. Ketika pandemi COVID-19 menyebar, pertumbuhannya melambat pada tahun 2021, kemudian mulai perlahan pulih pada tahun 2022. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan yang mengalami percepatan hingga mencapai 0,66 persen dengan capaian 67,29 tahun. Pemulihan ini diharapkan akan terus berlanjut kedepannya agar kualitas kesehatan penduduk kota Pagar Alam bisa terus membaik.

3.2 Capaian Dimensi Pengetahuan

Pendidikan merupakan sebuah kegiatan investasi yang hasilnya tidak dapat dirasakan atau dinikmati secara instan dalam jangka yang pendek. Upaya peningkatan kualitas penduduk yang dilakukan dengan meningkatkan standar dan kualitas pendidikan memang membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama agar outputnya bisa terlihat. Output kegiatan pendidikan berupa peningkatan kualitas modal manusia akan dirasakan pada masa mendatang.

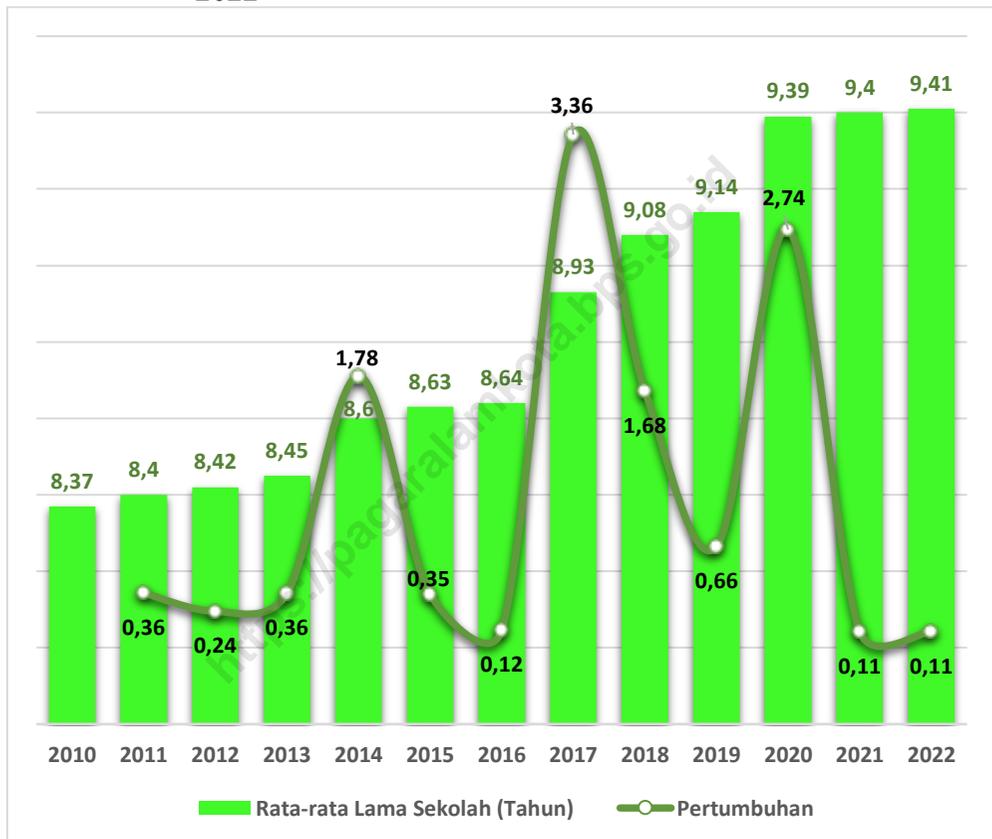
Pencapaian kedua indikator dimensi pendidikan baik harapan lama sekolah maupun rata-rata lama sekolah menggambarkan tolok ukur sejauh mana keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan yang telah dilaksanakan pada masa sekarang dan masa lampau. Secara umum, kedua indikator pendidikan tersebut mempresentasikan stok modal manusia (*human capital*) di Kota Pagar Alam.

Berdasarkan Gambar 3.2.1, Rata-Rata Lama Sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kota Pagar Alam pada tahun 2022 adalah sebesar 9,41 tahun. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa secara rata-rata, penduduk berusia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan Pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini menunjukkan program wajib belajar Sembilan tahun yang digalakkan oleh pemerintah selama ini sudah berjalan cukup baik di Kota Pagar Alam. Kebijakan ini harus lebih dipertegas dengan menambah alokasi anggaran untuk memfasilitasi para peserta didik yang memiliki kemampuan atau kapasitas belajar dan berasal dari rumah tangga kurang mampu untuk bisa melanjutkan sampai jenjang pendidikan yang tertinggi.

Apabila dilihat perkembangannya, trend capaian RLS Kota Pagar Alam selama periode 2010-2022 cenderung meningkat. Selama tiga tahun terakhir pun capaian RLS Kota Pagar Alam tetap mengalami kenaikan meski hanya

sedikit, yaitu sebesar 0,01 tahun per tahunnya. Namun, apabila dilihat dari pertumbuhannya, RLS cenderung stagnan dan tidak mengalami pertumbuhan yang berarti selama tahun 2021-2022.

Gambar 3.2.1. Capaian Dimensi Pengetahuan Kota Pagar Alam (RLS), 2010-2022

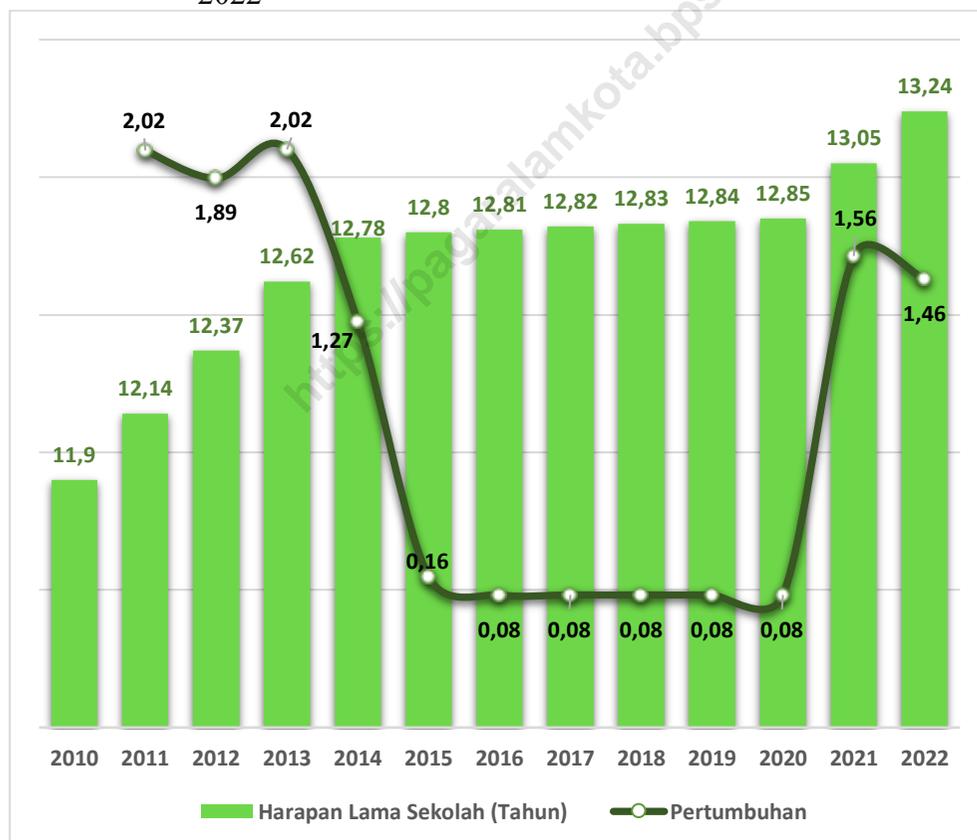


Sumber: BPS (diolah)

Berdasarkan Gambar 3.2.2, HLS Kota Pagar Alam adalah sebesar 13,24 tahun atau dapat diinterpretasikan bahwa penduduk usia 7 tahun ke atas diharapkan dapat menyelesaikan Pendidikan lebih dari SMA atau hingga level perguruan tinggi tahun pertama dengan kondisi aksesibilitas Pendidikan yang stagnan atau tidak ada perubahan yang berarti.

Apabila dilihat perkembangannya, secara umum HLS Kota Pagar Alam memiliki trend yang meningkat selama periode 2010-2022 meskipun peningkatan pada tahun 2015-2020 tidak terlalu signifikan dengan pertumbuhan yang cenderung stagnan. Kemudian, pada tahun 2021, capaian HLS Kota Pagar Alam mengalami kenaikan sebesar 0,20 tahun dengan pertumbuhan sebesar 1,56 persen. Pada tahun 2022, pertumbuhan HLS mengalami perlambatan sebesar 0,1 persen menjadi 1,46 persen dengan capaian sebesar 13,24 tahun.

Gambar 3.2.2 Capaian Dimensi Pengetahuan Kota Pagar Alam (HLS), 2010-2022



Sumber: BPS (diolah)

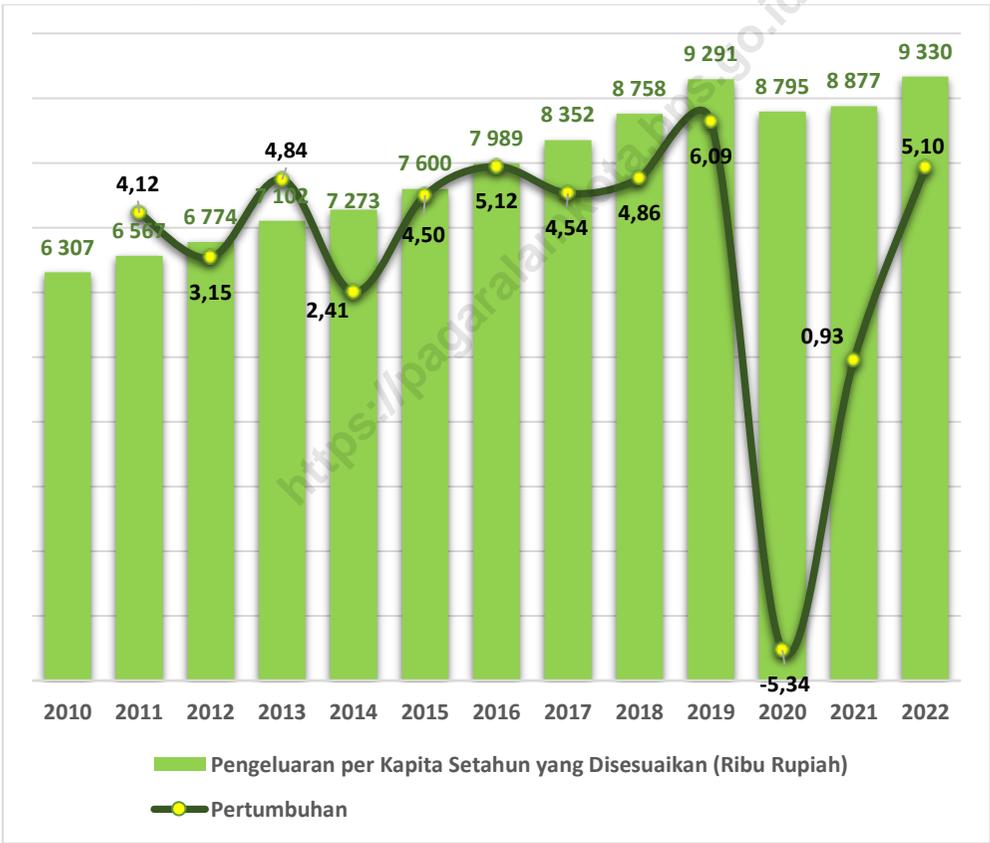
3.3 Capaian Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir pembentuk IPM adalah dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh indikator pengeluaran riil per kapita setahun yang disesuaikan dengan daya beli (PPP). Indikator ini menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu. Perkembangan nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Kota Pagar Alam selama periode 2010-2022 menunjukkan pola yang semakin meningkat, sebesar 43,93 persen, dengan nilai sebesar Rp. 6.307 ribu pada tahun 2010 menjadi Rp.9.330 ribu pada tahun 2022.

Apabila di *breakdown* kondisi sebelum pandemi dan setelah pandemi Covid menyebar, terlihat bahwa pertumbuhan pengeluaran riil yang disesuaikan mengalami penurunan yang sangat drastis. Sebelum pandemi, pertumbuhan berkisar 2-4 persen dengan rata-rata 4,40 persen. Sejak pandemi menyebar pada tahun 2020, pertumbuhan IPM mengalami kontraksi yang ditandai dengan angka pertumbuhan yang bernilai minus, artinya pengeluaran riil per kapita bahkan tidak mengalami kenaikan melainkan mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Kota Pagar Alam melemah. Penduduk banyak yang kehilangan pekerjaan, pendapatan menurun, sehingga konsumsi penduduk pun menurun. Selain itu, dampak dari kebijakan Pandemi Covid seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), *Lockdown*, *Work from Home*, *School From Home*, dan kebijakan-kebijakan lainnya menurunkan daya beli masyarakat karena kurangnya transaksi yang diakibatkan oleh kurangnya ruang gerak masyarakat. Pada tahun 2021, pertumbuhan pengeluaran riil per kapita perlahan mulai membaik dengan nilai pertumbuhan sebesar 0,93 atau meningkat sebesar 6,27 persen dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhan yang bernilai positif ini menunjukkan bahwa pengeluaran riil per kapita secara nominal mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian

penduduk perlahan mulai pulih. Kondisi ini pun terus membaik hingga pada tahun 2022 dimana pertumbuhannya mencapai 5,10 persen. Nilai pertumbuhan ini sudah kembali seperti kondisi sebelum pandemi, hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di Kota Pagar Alam secara umum sudah sangat membaik sejak pandemi Covid dan sudah perlahan kembali normal seperti sebelum pandemi.

Gambar 3.3. Capaian Dimensi Standar Hidup Layak Kota Pagar Alam 2010-2022

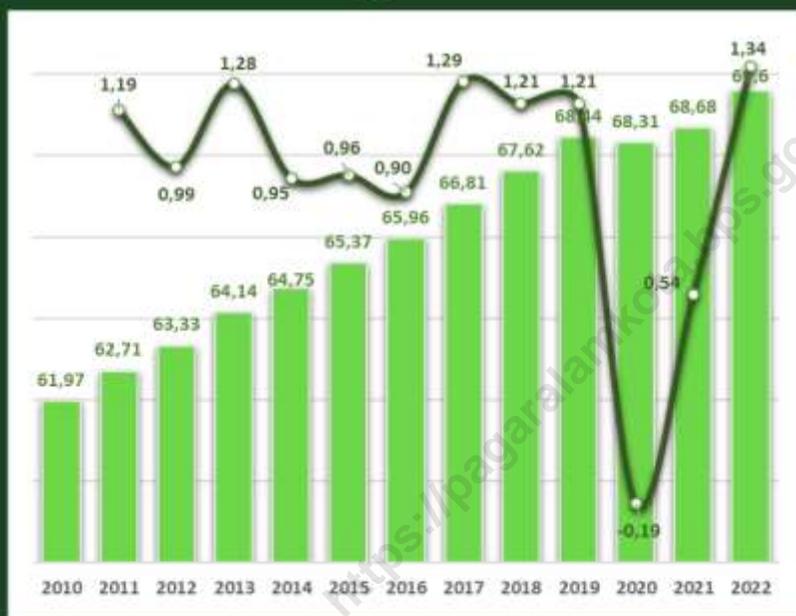


Sumber: BPS (diolah)

PERKEMBANGAN IPM DAN PERBANDINGAN REGIONAL

BAB IV

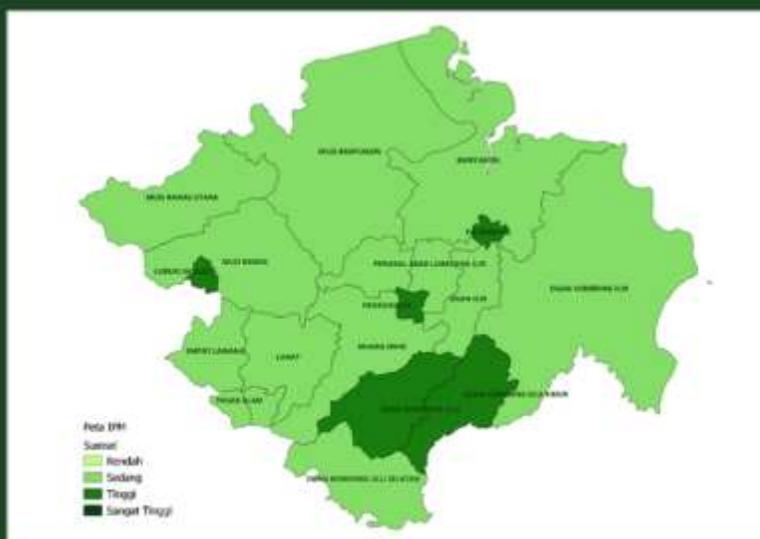
PERKEMBANGAN IPM



Secara umum, indeks pembangunan manusia di Kota Pagar Alam mengalami kenaikan selama periode 2010-2022 dengan IPM tahun 2022 sebesar 69,60 dengan kategori IPM **Sedang**

PERBANDINGAN REGIONAL

Secara umum, sebaran IPM di Sumatera Selatan sudah cukup baik. **sebagian besar kabupaten/kota** di Sumatera Selatan memiliki IPM dengan kategori **sedang (70,59 persen)** dan **sisanya (29,41 persen)** memiliki IPM dengan kategori **tinggi**.



BAB IV PERKEMBANGAN IPM DAN PERBANDINGAN REGIONAL

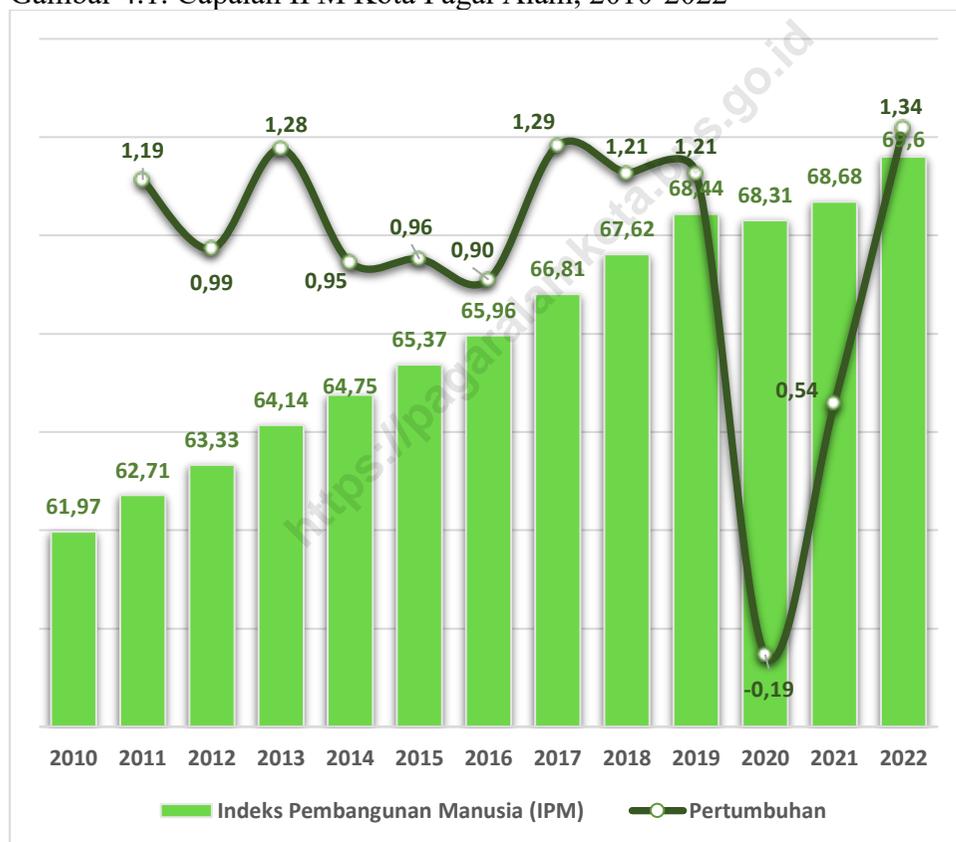
4.1 Perkembangan IPM

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang karena hasil pembangunan dari komponen pembangunannya seperti pembangunan pendidikan dan kesehatan memerlukan proses yang panjang dan waktu yang cukup lama agar bisa terlihat hasilnya. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Secara umum, pembangunan manusia di Kota Pagar Alam pada tahun 2010-2022 dapat dilihat pada Gambar 4.1. Berdasarkan gambar tersebut. Pembangunan manusia selama periode 2010-2022 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar 7,63 poin atau 12,31 persen, yaitu 61,97 pada tahun 2010 menjadi 69,60 pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 10,99 persen dibandingkan tahun 2010. Kenaikannya memang pelan dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan rata-rata 1 persen setiap tahunnya. Namun, perlu diingat bahwa IPM memang indikator untuk melihat pencapaian pembangunan manusia dalam jangka panjang, artinya hasilnya memang baru bisa dilihat dan dirasakan setelah sekian tahun yang datang. Hal ini terlihat dari data bahwa setelah lebih dari 10 tahun pembangunan manusia Kota Pagar Alam sudah mulai terlihat perkembangannya. Kenaikan nilai IPM ini tentu tidak terlepas dari peran komponen-komponen pembentuknya yang juga meningkat baik dengan atau tanpa intervensi dari pemerintah.

Apabila dilihat pertumbuhannya kondisi sebelum dan setelah pandemi, trendnya sama dengan salah satu dimensi pembentuknya yaitu pengeluaran riil perkapita. Pertumbuhan IPM Kota Pagar Alam mengalami kontraksi pada tahun 2020 (-0,19 persen) kemudian perlahan membaik pada tahun 2021 (0,54 persen) dan mulai kembali normal pada tahun 2022 (1,34 persen). Perkembangan IPM dari tahun 2010-2022 bisa dilihat pada Gambar 4.1

Gambar 4.1. Capaian IPM Kota Pagar Alam, 2010-2022



Sumber: BPS (diolah)

4.2 Perbandingan IPM Kota Pagar Alam dengan Kabupaten/Kota Lain di Sumatera Selatan

Apabila dilihat sebarannya, pada tahun 2022 pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota di Sumatera Selatan cukup bervariasi. IPM

pada level kabupaten/kota berkisar antara 65,74 (Kabupaten Musi Rawas Utara) hingga 79,47 (Kota Palembang). Untuk IPM Sumatera Selatan sendiri sebesar 70,9 dengan kategori IPM tinggi. Apabila dilihat pada Gambar 4.2, sebagian besar (70,59 persen) kabupaten/kota memiliki IPM dengan kategori sedang dan sisanya (29,41 persen) memiliki IPM dengan kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, pembangunan manusia di Sumatera Selatan sudah cukup merata, tidak *gap* yang terlalu tinggi antar wilayah. Pencapaian ini tentu perlu diapresiasi dan ditingkatkan lagi kedepannya agar semakin banyak kabupaten/kota yang memiliki IPM dengan kategori tinggi. Sehingga, kualitas manusia yang ada di Sumatera Selatan juga semakin baik dan akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Gambar 4.2. IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2022



Sumber: BPS (diolah)

Apabila dilihat berdasarkan komponen pembentuknya yaitu indeks kesehatan pada Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa kondisi kesehatan di Sumatera Selatan secara keseluruhan sudah cukup baik dan merata. Hampir semua kabupaten/kota memiliki indeks kesehatan yang berada pada rentang tinggi ($70 \leq \text{IKesehatan} < 80$) dan hanya ada satu kabupaten/kota yang memiliki indeks kesehatan dengan kategori sedang ($60 \leq \text{IKesehatan} < 70$) yaitu Kabupaten Empat Lawang (69,92). Namun, nilainya pun sebenarnya sudah mendekati 70, kedepannya diharapkan semua kabupaten/kota bisa memiliki indeks kesehatan tinggi atau bahkan sangat tinggi.

Gambar 4.3. Indeks Kesehatan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2022

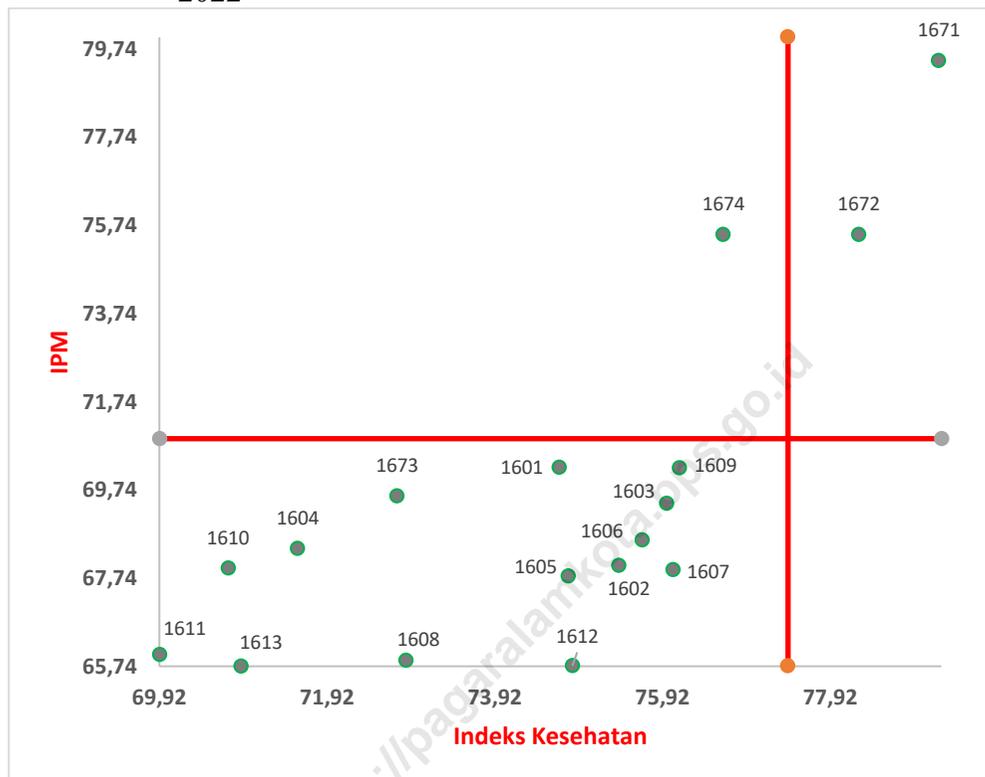


Sumber: BPS (diolah)

Apabila dibandingkan dengan nilai provinsi, berdasarkan Gambar 4.4, ada dua kabupaten/kota yang memiliki nilai IPM dan indeks kesehatan di atas nilai provinsi, yaitu Kota Palembang dan Prabumulih dimana nilai IPM dan indeks Kesehatan Kota Palembang merupakan yang tertinggi se-Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan dan kualitas manusia pada kedua kota ini lebih baik dibandingkan kabupaten/kota lain di Sumatera Selatan. Kondisi ini didukung dengan fakta bahwa Kota Palembang merupakan ibukota provinsi dimana kondisi sarana dan prasarana kesehatan merupakan yang terbaik dan terlengkap diantara yang lainnya. Kemudian, ada satu kota yang memiliki nilai IPM di atas nilai provinsi namun indeks kesehatannya masih di bawah nilai provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Lubuklinggau masih perlu upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan dari masyarakatnya. Sedangkan, empat belas kabupaten/kota lainnya memiliki nilai IPM dan indeks kesehatan di bawah nilai provinsi, artinya masih perlu berbagai kebijakan dan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat demi meningkatkan kualitas hidupnya terutama untuk Kabupaten Empat Lawang dimana nilai IPM dan Indeks Kesehatannya merupakan yang terendah se-Sumatera Selatan.

Untuk Kota Pagar Alam sendiri, indeks kesehatannya berada di posisi lima terbawah. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan penduduk Kota Pagar Alam masih cukup rendah dibandingkan kabupaten/kota lain. Kondisi ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan langkah yang akan diambil untuk meningkatkan pembangunan manusia di Kota Pagar Alam, yaitu dengan memprioritaskan peningkatan derajat kesehatan penduduknya.

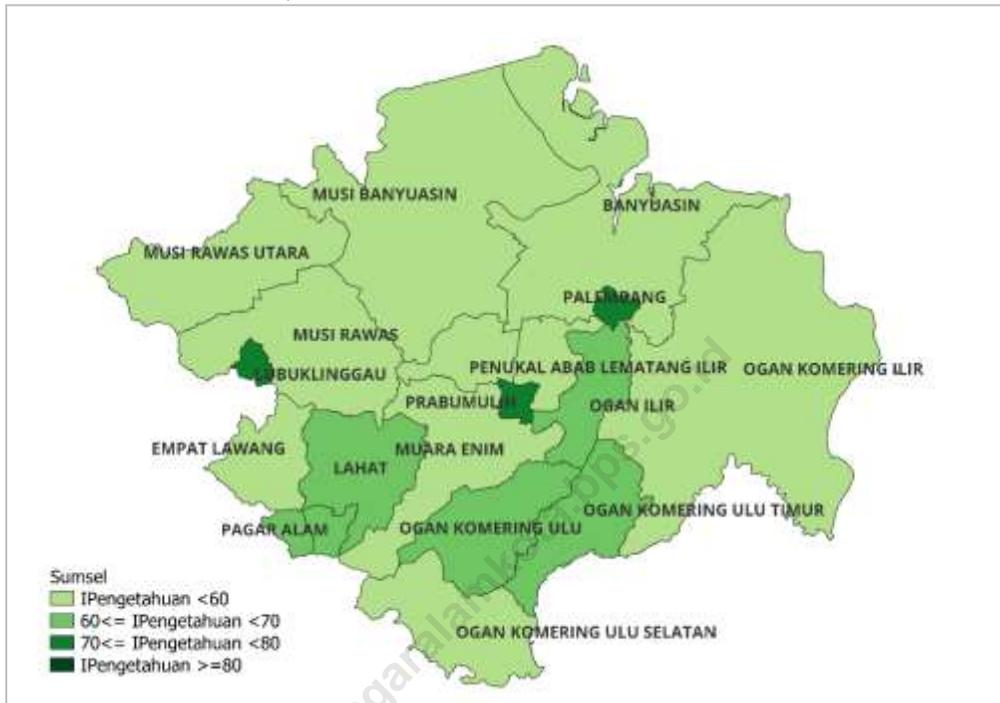
Gambar 4.4. IPM dan Indeks Kesehatan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2022



Sumber: BPS (diolah)

Dimensi yang tak kalah penting dari kesehatan adalah pengetahuan berdasarkan Gambar 4.5, indeks pengetahuan kabupaten/kota di Sumatera Selatan cukup bervariasi. Ada 3 kabupaten/kota yang memiliki indeks pengetahuan dengan kategori sangat tinggi yaitu Kota Palembang, Prabumulih, dan Lubuklinggau (17,65 persen). Kemudian, ada 5 kabupaten/kota yang memiliki indeks pengetahuan tinggi yaitu Kota Pagar Alam, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, dan Ogan Ilir (29,41 persen). Sedangkan sisanya memiliki indeks pengetahuan sedang (52,94 persen). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu melakukan usaha yang lebih dalam hal peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di wilayah yang memiliki indeks pengetahuan kategori sedang.

Gambar 4.5. IPM dan Indeks Pengetahuan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2022

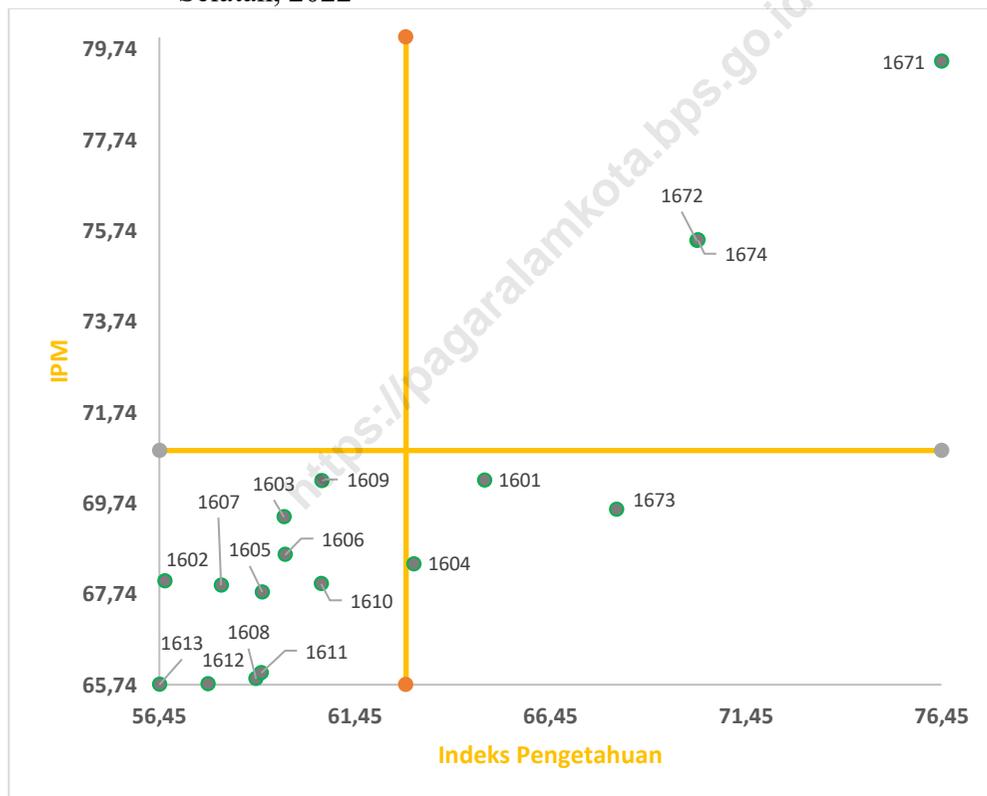


Sumber: BPS (diolah)

Apabila dilihat perbandingnya dengan nilai provinsi, berdasarkan Gambar 4.6 ada tiga kabupaten/kota yang memiliki nilai IPM dan indeks pengetahuan di atas nilai provinsi yaitu Kota Palembang, Prabumulih, dan Lubuklinggau. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan di ketiga kota ini lebih baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Selanjutnya, ada tiga kabupaten/kota yang memang memiliki nilai IPM di bawah provinsi tetapi nilai indeks pengetahuannya di atas nilai provinsi yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Kabupaten Lahat, dan Kota Pagar Alam sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di ketiga kabupaten/kota ini sudah cukup baik sehingga kebijakan-kebijakan yang akan diambil terkait IPM lebih baik diprioritaskan untuk dimensi lain namun tanpa melupakan dimensi ini tentunya. Sedangkan sebelas kabupaten/kota lain memiliki nilai IPM dan

indeks pengetahuan di bawah nilai provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa daerah ini merupakan daerah yang perlu diperhatikan jika pemerintah provinsi ingin memberikan bantuan dalam hal peningkatan kualitas Pendidikan di Sumatera Selatan, terutama Kabupaten Musi Rawas Utara karena Indeks Pengetahuannya merupakan yang terendah diantara kabupaten/kota lain yaitu hanya sebesar 56,45.

Gambar 4.6. IPM dan Indeks Pengetahuan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2022

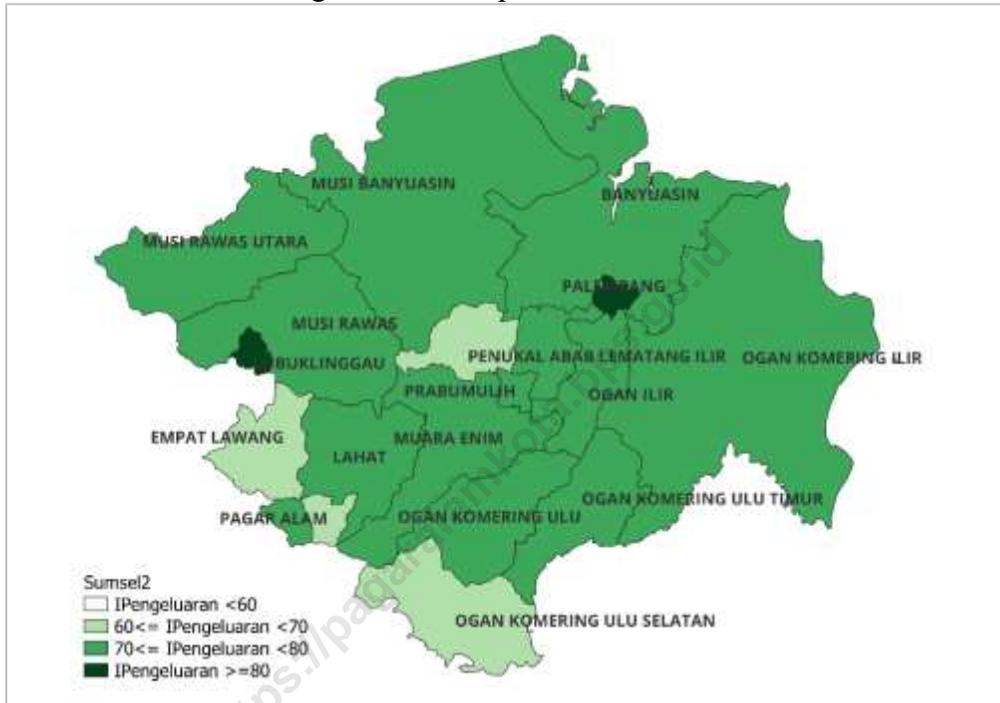


Sumber: BPS (diolah)

Dimensi terakhir dari pembentuk IPM adalah dimensi standar hidup layak. Pada Gambar 4.7 terlihat bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Selatan memiliki indeks pengeluaran dengan kategori tinggi (64,71 persen). Ada 2 kabupaten/kota yang memiliki indeks pengeluaran sangat

tinggi yaitu Kota Palembang dan Lubuklinggau. Sedangkan sisanya, memiliki indeks pengeluaran sedang salah satunya Kota Pagar Alam (23,53 persen).

Gambar 4.7. Indeks Pengeluaran Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2022



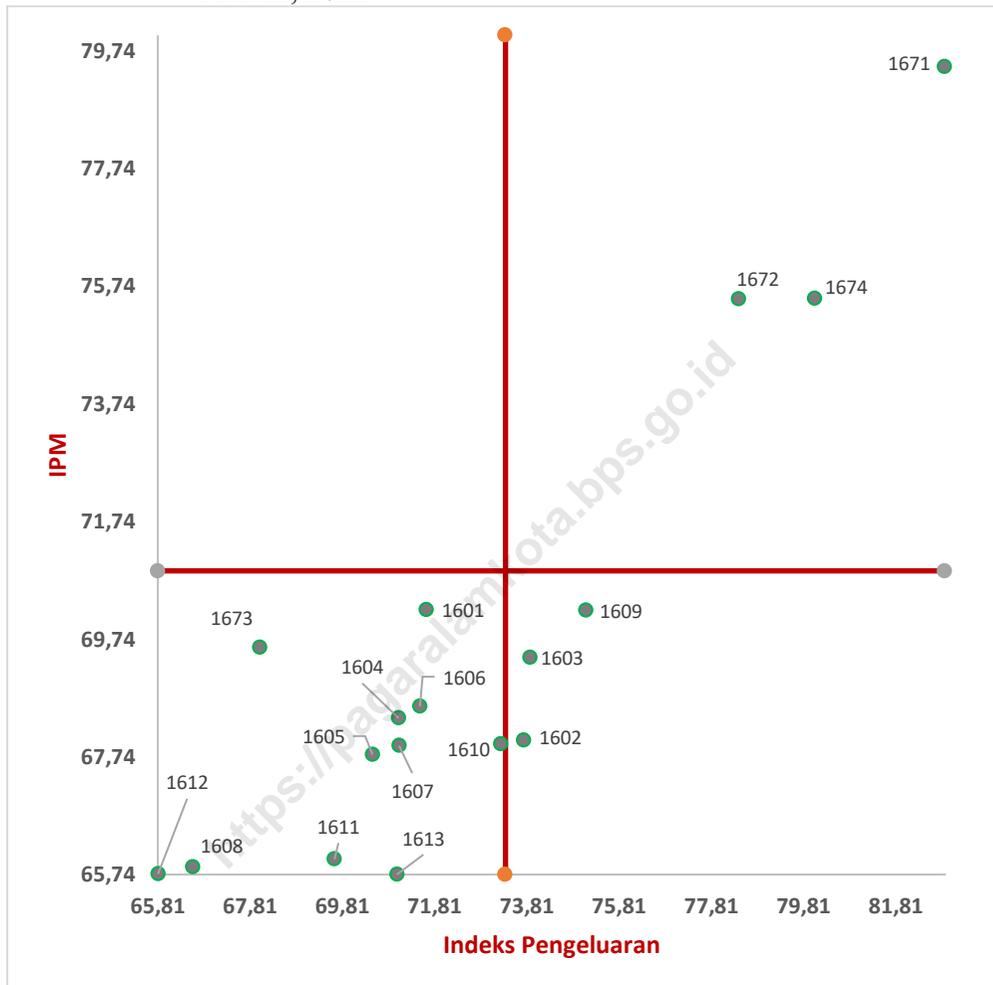
Sumber: BPS (diolah)

Apabila dilihat perbandingannya dengan nilai provinsi pada Gambar 4.8 terlihat bahwa kondisi ini sama dengan kondisi dimensi pengetahuan dimana Kota Palembang, Prabumulih, dan Lubuklinggau memiliki nilai IPM dan Indeks Pengeluaran di atas nilai provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas manusia di ketiga kota ini merupakan yang terbaik di Sumatera Selatan hanya saja Kota Lubuklinggau masih perlu peningkatan pada dimensi kesehatan. Selanjutnya, ada tiga kabupaten/kota yang memiliki nilai IPM di bawah nilai provinsi namun nilai indeks pengeluarannya di atas nilai provinsi, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Muara Enim, dan Ogan Komering Ulu Timur (OKUT). Sedangkan, untuk sebelas kabupaten/kota lainnya

memiliki nilai IPM dan Indeks Pengeluaran di bawah nilai provinsi. Kabupaten/kota dengan nilai Indeks Pengeluaran terendah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yaitu hanya sebesar 65,81 dengan nilai pengeluaran riil per kapita sebesar Rp. 8,680 juta per tahun.

Untuk kota Pagar Alam sendiri, indeks pengeluarannya berada di posisi tiga terbawah diantara semua kabupaten/kota di Sumatera Selatan dengan nilai indeks hanya sebesar 68,02. Hal ini menunjukkan bahwa selain dimensi kesehatan, dimensi standari hidup layak juga perlu menjadi prioritas pemerintah dalam hal pembangunan. Kebijakan yang dapat ditempuh untuk mempertahankan dan meningkatkan daya beli penduduk adalah menjaga stabilitas harga komoditas kebutuhan rumah tangga agar tidak terlalu berfluktuasi dan tetap terkendali. Hal ini penting untuk dijaga karena akan memengaruhi persepsi konsumen. *Supply* beberapa komoditas yang bernilai strategis terutama bahan makanan pokok dan komoditas energi harus tetap terjaga secara berkesinambungan, setiap kebijakan untuk mengubah atau menyesuaikan harga terutama pada komoditas strategis (BBM, listrik, dan elpiji) harus dipertimbangkan secara matang karena memiliki dampak dan implikasi yang luas dalam mendorong kenaikan harga pada kelompok komoditas yang lainnya dan secara tidak langsung akan berpengaruh pada penurunan daya beli penduduk.

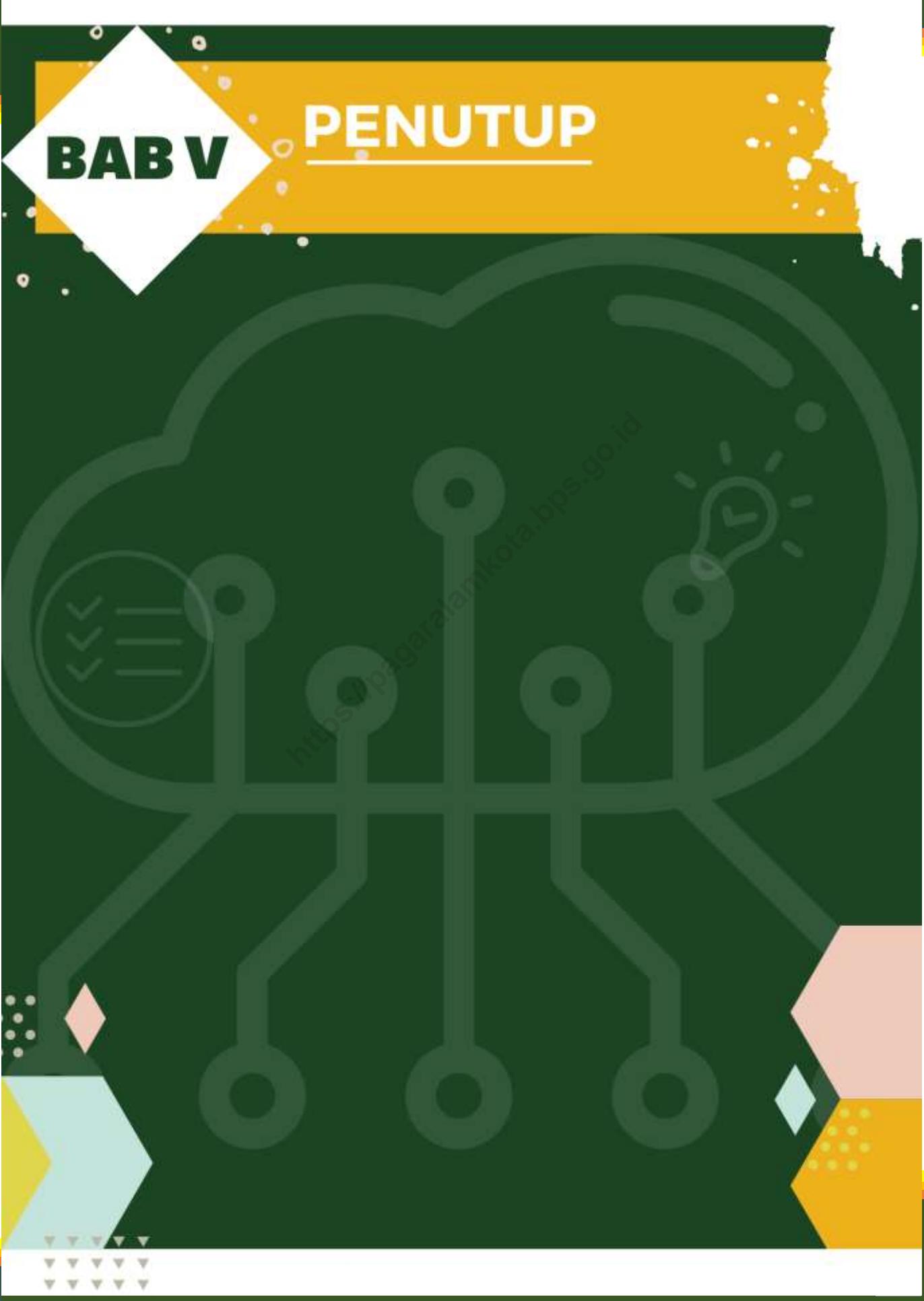
Gambar 4.8. IPM dan Indeks Pengeluaran Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2022



Sumber: BPS (diolah)

BAB V

PENUTUP



BAB V PENUTUP

Beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan berdasarkan hasil pembahasan:

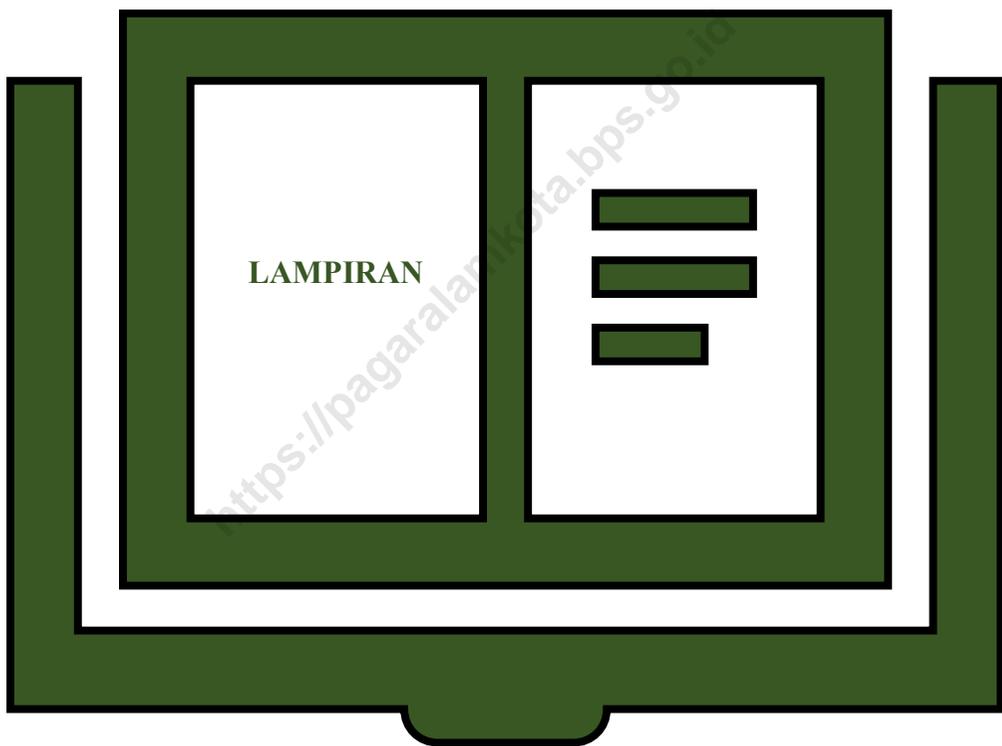
1. Capaian kualitas pembangunan manusia Kota Pagar Alam yang diukur dengan indikator komposit IPM menunjukkan perkembangan yang semakin membaik hingga tahun 2022 ini.
2. IPM Kota Pagar Alam pada tahun 2022 tercatat sebesar 69,60 dan termasuk dalam kategori IPM sedang. Pada level provinsi, IPM Kota Pagar Alam berada pada peringkat ke enam diantara tujuh belas kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Pertumbuhan IPM pada tahun 2022 tercatat sebesar 5,10 persen.
3. Semua komponen penyusun IPM menunjukkan perkembangan yang semakin membaik selama periode 2010-2022 ini. Apabila dilihat dari besarnya peran tiap dimensi, indeks kesehatan memiliki andil terbesar namun secara keseluruhan semua dimensi memiliki peran yang hampir sama besar. Hal ini terlihat dari gap indeks antar dimensi yang tidak terlalu besar.
4. Apabila dilihat sebaran IPM menurut kabupaten/kota, IPM tertinggi di Sumatera diraih oleh Kota Palembang dengan IPM sebesar 79,47 diikuti oleh Kota Lubuklinggau dan Prabumulih dengan nilai IPM masing-masing sebesar 75,53 dan 75,52. IPM di ketiga kota ini merupakan IPM dengan kategori “tinggi” sedangkan 14 kabupaten/kota lainnya masih berada pada kategori “sedang” dengan IPM terendah diraih oleh Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu sebesar 65,74.
5. Apabila dilihat dari indeks komponen pembentuknya, indeks pengetahuan antar kabupaten/kota di Sumatera selatan cukup variatif. Kabupaten/kota dengan indeks kesehatan tertinggi adalah Kota Palembang dengan nilai sebesar 79,22 diikuti oleh Kota Prabumulih dan Lubuklinggau dengan nilai

masing-masing sebesar 78,26 dan 76,65. Untuk Kota Pagar Alam, indeks kesehatannya berada pada urutan kelima terendah, artinya kualitas kesehatan penduduk Kota Pagar Alam masih cukup rendah dibandingkan kabupaten/kota lain oleh karena itu pemerintah perlu melakukan upaya yang lebih dalam meningkatkan kualitas kesehatan.

6. Pola yang hampir sama juga terjadi pada indeks pengetahuan, dimana kabupaten/kota yang memiliki indeks pengetahuan tertinggi adalah Kota Palembang dengan nilai sebesar 76,45, kemudian diikuti oleh Kota Lubuklinggau dan Prabumulih dengan indeks masing-masing sebesar 70,23 dan 70,19. Untuk Kota Pagar Alam sendiri berada pada posisi keempat dengan nilai sebesar 68,14. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Pendidikan di Kota Pagar Alam sudah cukup baik dibandingkan kabupaten/kota lain.
7. Indeks pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan sebagai proksi daya beli penduduk antar kabupaten/kota di Sumatera Selatan juga menunjukkan pola yang cukup bervariasi. Kabupaten/kota dengan indeks pengeluaran per kapita riil disesuaikan yang tertinggi pada tahun 2022 adalah Kota Palembang dengan nilai indeks sebesar 82,87 sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dengan nilai 65,81. Untuk Kota Pagar Alam sendiri, Indeks pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan berada pada posisi tiga terendah. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi ini memerlukan perhatian yang lebih dari pemerintah dan pemangku kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas manusia di Kota Pagar Alam kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia 2021*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Selatan 2021*. Palembang: BPS Sumatera Selatan.
- Jen, M.H. dkk. (2010). *International Variations in Life Expectancy: A Spatio – Temporal Analysis*. *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie* 101(1), p. 73.
- Todaro, Micheal P, dan Stepen. C. Smith (2003). *Economic Development/ Eight Edition*. Newyork: Pearson.
- United Nations Development Programme. (1990). *Human Development Report 1990*. New York: UNDP.
- United Nations Development Programme. (1995). *Human Development Report 1995*. New York: UNDP.



Lampiran 1. Capaian Angka Harapan Hidup Kota Pagar Alam, 2010-2022

Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Pertumbuhan (persen)
(1)	(2)	(3)
2010	65,28	
2011	65,35	0,11
2012	65,41	0,09
2013	65,47	0,09
2014	65,50	0,05
2015	65,70	0,31
2016	65,78	0,12
2017	65,87	0,14
2018	66,14	0,41
2019	66,41	0,41
2020	66,71	0,45
2021	66,85	0,21
2022	67,29	0,66

Sumber: BPS Kota Pagar Alam

<https://pagaralamkota.bps.go.id>

Lampiran 2. Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pagar Alam, 2010-2022

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Pertumbuhan (persen)
(1)	(2)	(3)
2010	8,37	
2011	8,40	0,36
2012	8,42	0,24
2013	8,45	0,36
2014	8,60	1,78
2015	8,63	0,35
2016	8,64	0,12
2017	8,93	3,36
2018	9,08	1,68
2019	9,14	0,66
2020	9,39	2,74
2021	9,40	0,11
2022	9,41	0,11

Sumber: BPS Kota Pagar Alam

Lampiran 3. Capaian Harapan Lama Sekolah Kota Pagar Alam, 2010-2022

Tahun	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Pertumbuhan (persen)
(1)	(2)	(3)
2010	11,90	
2011	12,14	2,02
2012	12,37	1,89
2013	12,62	2,02
2014	12,78	1,27
2015	12,80	0,16
2016	12,81	0,08
2017	12,82	0,08
2018	12,83	0,08
2019	12,84	0,08
2020	12,85	0,08
2021	13,05	1,56
2022	13,24	1,46

Sumber: BPS Kota Pagar Alam

<https://pagaralamkota.bps.go.id>

Lampiran 4. Capaian Pengeluaran Per Kapita Riil yang Disesuaikan (PPP)
Kota Pagar Alam, 2010-2022

Tahun	Pengeluaran Per Kapita Riil yang Disesuaikan (PPP) (Ribu rupiah)	Pertumbuhan (persen)
(1)	(2)	(3)
2010	6 307	
2011	6 567	4,12
2012	6 774	3,15
2013	7 102	4,84
2014	7 273	2,41
2015	7 600	4,50
2016	7 989	5,12
2017	8 352	4,54
2018	8 758	4,86
2019	9 291	6,09
2020	8 795	-5,34
2021	8 877	0,93
2022	9 330	5,10

Sumber: BPS Kota Pagar Alam

Lampiran 5. Indeks Pembangunan Manusia Kota Pagar Alam, 2010-2022

Tahun	Pengeluaran Per Kapita Riil yang Disesuaikan (PPP) (Ribu rupiah)	Pertumbuhan (persen)
(1)	(2)	(3)
2010	61,97	
2011	62,71	1,19
2012	63,33	0,99
2013	64,14	1,28
2014	64,75	0,95
2015	65,37	0,96
2016	65,96	0,90
2017	66,81	1,29
2018	67,62	1,21
2019	68,44	1,21
2020	68,31	-0,19
2021	68,68	0,54
2022	69,60	1,34

Sumber: BPS Kota Pagar Alam

<https://pagaralamkota.bps.go.id>

Lampiran 6. Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuk IPM Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2022

Kabupaten/Kota	AHH	RLS	HLS	PPP	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ogan Komering Ulu	68,55	8,73	12,84	10 499	70,24
Ogan Komering Ilir	69,01	7,07	11,89	11 251	68,02
Muara Enim	69,38	7,90	11,99	11 304	69,43
Lahat	66,52	8,53	12,43	10 296	68,40
Musi Rawas	68,62	7,55	12,21	10 107	67,78
Musi Banyuasin	69,19	7,65	12,30	10 453	68,60
Banyuasin	69,43	7,45	11,95	10 299	67,93
Ogan Komering Ulu Selatan	67,36	7,86	11,78	8 895	65,87
Ogan Komering Ulu Timur	69,48	7,80	12,46	11 759	70,23
Ogan Ilir	65,98	7,91	12,32	11 069	67,96
Empat Lawang	65,45	7,65	12,08	9 838	66,00
Penukal Abab Lematang Ilir	68,65	7,06	12,30	8 680	65,75
Musi Rawas Utara	66,08	7,26	11,61	10 283	65,74
Palembang	71,49	10,91	14,43	15 168	79,47
Prabumulih	70,87	10,20	13,03	13 106	75,52
Pagar Alam	67,29	9,41	13,24	9 330	69,60
Lubuklinggau	69,82	9,91	13,39	13 832	75,53
SUMATERA SELATAN	70,32	8,37	12,55	11 109	70,90

Sumber: BPS Kota Pagar Alam

Lampiran 7. Indeks Komponen Pembentuk IPM Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, 2022

Kabupaten/Kota	IKesehatan	IPengetahuan	IPengeluaran
(1)	(2)	(3)	(4)
Ogan Komering Ulu	74,69	64,77	71,63
Ogan Komering Ilir	75,40	56,59	73,74
Muara Enim	75,97	59,64	73,89
Lahat	71,57	62,96	71,03
Musi Rawas	74,80	59,08	70,47
Musi Banyuasin	75,68	59,67	71,49
Banyuasin	76,05	58,03	71,04
Ogan Komering Ulu Selatan	72,86	58,92	66,56
Ogan Komering Ulu Timur	76,12	60,61	75,09
Ogan Ilir	70,74	60,59	73,24
Empat Lawang	69,92	59,06	69,64
Penukal Abab Lematang Ilir	74,85	57,70	65,81
Musi Rawas Utara	70,89	56,45	70,99
Palembang	79,22	76,45	82,87
Prabumulih	78,26	70,19	78,40
Pagar Alam	72,75	68,14	68,02
Lubuklinggau	76,65	70,23	80,05
SUMATERA SELATAN	77,42	62,76	73,35

Sumber: BPS Kota Pagar Alam

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PAGAR ALAM**

Jalan Laskar Wanita Mentarjo, Komplek Perkantoran
Gunung Gare, Pagar Wangi, Kota Pagar Alam
Telp: (0730) 623511, email: bps1673@bps.go.id

